PKM PARHOBAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 1 No. 1 Bulan Januari 2026, Hal. 53-57

PERAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

Ade Adryana[1], Agnes Paska[2], Regina Samosir[3], Kepler Sinaga[4]
[1234]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas HKBP Nommensen Medan
Email: ade.adryana@student.uhn.ac.id[1] regina.samosir@student.uhn.ac.id[2]
agnes.paska@student.uhn.ac.id[3] sinaga.kepler63@gmail.com[4]

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises (SMEs) play an important role in supporting the regional economy through job creation and the improvement of community welfare. Therefore, SME empowerment has become one of the main priorities of local governments, particularly through the role of the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of North Sumatra Province. This journal aims to identify and analyze the role of the Office of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province in supporting SME empowerment during the internship period. The method used is a qualitative descriptive approach through direct observation of service and assistance activities provided to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as well as documentation studies conducted during the internship. The results indicate that the Office of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province acts as a facilitator, companion, and supervisor in SME empowerment, particularly through the facilitation of business legality, administrative guidance, and continued assistance by the Integrated Business Service Center (UPT PLUT). These roles aim to enhance the capacity, independence, and competitiveness of SMEs so that they are able to develop sustainably. Thus, the presence of the Office of Cooperatives and SMEs of North Sumatra Province makes a significant contribution to strengthening and developing SMEs in the region.

Keywords: *MSMEs, empowerment, role of local government, Office of Cooperatives and SMEs.*

ABSTRACT

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan UKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, khususnya melalui peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pemberdayaan UKM selama pelaksanaan kegiatan magang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan dan pendampingan UMKM, serta studi dokumentasi selama masa magang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan pembina

dalam pemberdayaan UKM, khususnya melalui fasilitasi legalitas usaha, pembinaan administrasi, serta pendampingan lanjutan oleh UPT PLUT. Peran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku UKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung penguatan dan pengembangan UKM di daerah.

Kata kunci: UMKM, pemberdayaan, peran pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha produktif yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan (Tambunan 2012). Namun pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses pasar.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan dan memberikan perhatian langsung kepada Masyarakat agar kemampuan dan potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Melalui pengem-bangan usaha lokal, hal ini akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha yang memiliki kemampuan untuk membuka dan memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan mereka.

Oleh karena itu, kegiatan magang di instansi ini menjadi sarana pembelajaran yang penting bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung peran dan fungsi dinas dalam mendukung pengembangan UMKM

METODE

Jurnal magang ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan praktik kerja lapangan (magang) yang dilaksakan Di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, UPTD Plut KUKM JL. Gatot Subroto KM 5.5. Kegiatan magang ini berlangsung

selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 28 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025.

Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh dinas koperasi adalah mulai dari Pukul 08.00 hingga 16.30 WIB pada hari Senin-Kamis dan Pukul 08.00 hingga 17.00 WIB pada hari Jumat. Selama penugasan, praktikan terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan layanan administratif. Penulis ditempatkan pada bagian Front Office dan dilibatkan langsung dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat dan pelaku UKM.

PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu pemerataan ekonomi di berbagai wilayah (Hidayat, Lesmana, & Latifah, 2022).

Pemberdayaan UMKM bukan hanya soal bantuan modal, melainkan juga strategi kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penyerapan tenaga kerja (Ondang et al., 2019).

Widodo (2008) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM diarahkan pada peran pemerintah sebagai fasilitator melalui pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi permodalan guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara berperan sebagai penghubung dalam pelayanan administrasi dan legalitas usaha. Dinas Koperasi dan UKM membantu pelaku UMKM dalam pengurusan perizinan

usaha, NPWP, serta dokumen pendukung lainnya.

Proses pembuatan dokumen legalitas usaha diawali dengan mengajukan permohonan oleh pelaku UKM yang ingin memperoleh legalitas usahanya, dengan melakukan verifikasi dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, serta data umum terkait jenis dan lokasi usaha. Setelah berkas terpenuhi, pengajuan dilakukan secara daring melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan melalui melalui dan laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi pelaku UKM yang belum memilikinya. Legalitas usaha ini menjadi dasar penting bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, mengakses pembiayaan, serta mengikuti program pembinaan pemerintah.

Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh pelaku usaha, antara lain untuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perizinan edar produk, dan akses pembiayaan usaha. Setelah seluruh dokumen legalitas selesai diproses dan diterbitkan, dilakukan pencatatan data pelaku usaha dan ditetapkan sebagai UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Tahapan akhir dalam proses ini adalah pelaksanaan pemantauan dan pendampingan lanjutan oleh UPT PLUT guna memastikan pemanfaatan dokumen legalitas secara optimal dalam mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas usaha.

Melalui kegiatan pendampingan ini, dinas berperan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas usaha,

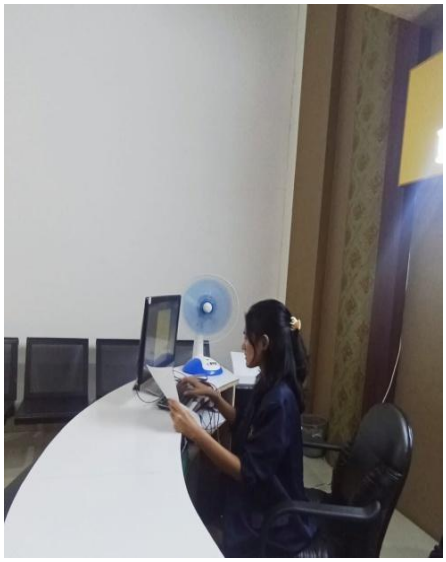
memperkuat profesionalisme pelaku usaha, serta mendorong keberlanjutan UKM.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan magang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan UKM. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UKM.

Secara umum, peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam pemberdayaan UKM diwujudkan melalui pelaksanaan proses yang terstruktur dan berkelanjutan, yang mencakup fasilitasi pemenuhan legalitas usaha, pendataan pelaku usaha, penetapan sebagai UKM binaan, serta pendampingan lanjutan. Pelaksanaan peran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UKM secara berkelanjutan



Gambar 1



Gambar 2

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UKM melalui mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Instansi terkait berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung pelaku usaha dalam memperoleh legalitas, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat rekomendasi, izin edar produk, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selanjutnya, melalui pendampingan dan pembinaan, termasuk pelatihan serta monitoring lanjutan oleh UPT PLUT, pelaku UKM mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing usahanya secara berkelanjutan. Dengan penerapan strategi pemberdayaan yang terpadu antara legalitas, pembinaan, dan pendampingan, instansi terkait terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas pelaku UKM sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional

REFERENSI

Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). *Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional*

Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). *Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa*. Jurnal Eksekutif, 3(3).

Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Widodo, D. (2008). *Strategi Pemberdayaan Umkm Pada Dinas Keperasi Dan Umkm Kota Surabaya*. 1–6.